Masyarakat Tionghoa Di Solo Dan Organisasi Sosial (Dari Terbentuknya CMKH Sampai PMS)

Chandra Halim[1]
Silverio R. L. Aji Sampurno[2]

PENDAHULUAN

Kota Surakarta yang dikenal dengan nama kota Sala atau Solo, pada awalnya hanya sebuah desa kecil yang masih terdapat banyak hutan-hutan. Akibat geger pecinan yang terjadi di Kartasura, kerajaan Mataram Islam yang berada di bawah kekuasaan Pakubuwana II (1727-1749) keratonnya harus berpindah dari Kartasura ke Solo yang letaknya sedikit ke arah timur dari keraton lama. Pakubuwana II membangun keraton di desa Solo untuk menggantikan keraton lamanya yang rusak di daerah Kartasura. Pada tanggal 17 Februari 1746, pindahan dilakukan dari keraton lama ke keraton yang baru, meskipun proses pembangunan belum selesai sepenuhnya. Status Keraton Surakarta pada masa sebelum perjanjian Giyanti (1755) adalah sebagai pusat pemerintahan atau ibukota kerajaan Mataram Islam.

Melalui perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755, Mataram Islam dipecah menjadi dua yakni Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dengan demikian maka Keraton Solo menjadi

---

[1] Alumnus Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma. Saat ini menjadi dosen tidak tetap di Universitas Sanata Dharma.

[2] Dosen Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma.

ibukota dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Oleh Belanda, Kasunanan Surakarta wilayahnya dipecah lagi menjadi dua melalui perjanjian Kalicacing Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757. Isi perjanjian tersebut antara lain membagi wilayah Kasunanan Surakarta menjadi dua yakni Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Adapun wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta adalah Surakarta, Kartasura, Klaten, Boyolali, Ampel dan Sragen, serta satu kawedanan yaitu Larangan. Sedangkan kadipaten Mangkunegaran membawahi tiga kawedanan yaitu Ibu Kota, Karanganyar, dan Wonogiri. Untuk Belanda sendiri membawahi 5 deel (bagian/wilayah) yang berada di Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Campur tangan pemerintah kolonial Belanda makin besar dengan diangkat seorang residen untuk wilayah Surakarta (selanjutnya disebut Solo). Dengan demikian Solo menjadi sebuah kota karesidenan yang dipimpin oleh seorang residen yang diangkat Gubernur Jendral Belanda di Batavia.

Dengan berdirinya Solo sebagai kota karesidenan, semakin membuat posisi Belanda menjadi sangat penting. Pengaruh yang dibawa Belanda begitu besar, dari segi tata pemerintahan, tata kota, gaya arsitektur bangunan di Solo, dan masuknya kebudayaan Barat melalui tradisi pesta-pesta (termasuk dansa), musik dan agama (gereja) mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Solo khususnya orang-orang Tionghoa yang ada di tempat tersebut. Pembahasan mengenai Komunitas Tionghoa di Solo diawali dengan penjelasan tentang keberadaan mereka di Solo, keragaman etnik yang membagi antara Tionghoa totok dan peranakan, agama dan budaya, serta organisasi dan pekerjaannya.

KEBERADAAN ORANG TIONGHOA DI SOLO

Berdasarkan bukti sejarah yang ada, menunjukkan bahwa pemukiman keluarga-keluarga Tionghoa sudah ada di Solo selama beberapa abad yang lalu. Secara singkat disebutkan bahwa saat Solo menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Pajang di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, komunitas Tionghoa sudah banyak yang bermukim di wilayah tersebut. Solo dan Yogyakarta merupakan daerah-daerah pertanian yang sangat subur, dari akhir abad ke-16 sampai awal abad ke-19, kedua wilayah ini menjadi pusat politik utama Jawa Tengah dan Jawa Timur, negeri Etnik bangsa Jawa . Di daerah Solo sendiri, merupakan daerah yang dikuasai oleh 2 generasi kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram Islam.

Ketika Solo di bawah kekuasaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Pakubuwana II, wilayah ini merupakan sentral dari segala bidang. Bermacam-macam suku bangsa hidup di wilayah ini, salah satunya Etnik Tionghoa. Pusat pemerintahan Mataram Islam kala itu berada di Kartasura, namun oleh karena geger Pecinan akhirnya dipindahkan ke Solo. Kepindahan Keraton Mataram Islam pemerintahan Pakubuwana II ke Solo, diikuti pula dengan kepindahan Klenteng "Tien Kok Sie" ke wilayah baru tersebut, maka secara tidak langsung banyak Etnik Tionghoa yang juga menyebar ke wilayah ini. Dari tahun pembuatan Klenteng "Tien Kok Sie" (ketika itu masih di Kartasura) yang terletak di Jalan. Pasar Besar Ketandan No. 65 Solo yakni tahun 1745, diketahui bahwa Etnik Tionghoa sudah ada di Solo sekitar tahun 1740[3] dan membentuk koloni.

[3] Di setiap daerah manapun di Indonesia, dimana ada Etnik Tionghoa (yang banyak jumlahnya) di situ pasti ada tempat ibadat yang berupa Klenteng, Vihara atau Lithang. Ketika

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika jaman Kolonial Belanda berkuasa di Indonesia, masyarakat Tionghoa di Solo harus tunduk pada peraturan-peraturan pemerintah kolonial yang bersifat diskriminatif seperti halnya Tionghoa di daerah lain. Sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Belanda menetapkan peraturan dalam bidang hukum yang bersifat memojokkan komunitas Tionghoa. Sistem Lapisan ras, sistem wilayah tempat tinggal (wijkenstelsel) dan surat jalan (Passenstelsel) [4], serta sistem agraria (mengacu pada UU Agraria 1870) yang melarang mereka memiliki tanah, membuat komunitas ini semakin terkekang.

Masyarakat Tionghoa di Solo ditempatkan dalam sebuah pecinan di daerah Balong dan sekitar Pasar Gedhe Solo. Namun tempat tinggal orang-orang Tionghoa tidak lagi di pecinan

---

orang-orang Tionghoa datang ke Indonesia, mereka membawa serta budaya dan agama/ kepercayaan mereka (pada waktu itu, orang-orang Tionghoa masih beragama Buddha, Tao, Khonghucu atau disebut Tridharma/ Sam Kau Hwee). Setelah menetap hampir 4-5 tahun didaerah asing tersebut, mereka baru membangun kuil atau Klenteng sebagai tempat peribadatan mereka. Mereka biasanya sibuk mengurus keadaan perekonomian mereka terlebih dahulu, baru jikalau dirasa cukup mapan dan tercukupi, mereka akan membangun Klenteng sebagai ucapan terimakasih pada Ie Wang Shangdi/ Tuhan YME.

[4] Wijkenstelsel berasal dari kata “Wijk-en” dan “stel’sel” yang artinya Wijk-en (kampung atau lingkungan) dan stel’sel (aturan atau keseluruhan prinsip), aturan tempat tinggal; sedangkan Passenstelsel berasal dari kata “Passen” dan stel’sel yang artinya Passen (langkah/perjalanan) dan stel’sel (aturan), aturan langkah atau perjalanan

tetapi menyebar ke tempat-tempat lain setelah tahun 1917 yakni dengan dihapuskannya sistem Wijkenstelsel dan Passenstelsel tadi. Sejak dihapusnya peraturan tersebut dan dengan bertambahnya jumlah emigran Tionghoa ke Indonesia, maka orang-orang Tionghoa tidak harus tinggal di pecinan itu[5].

Daerah Balong tetap menjadi Pecinan. Tetapi pada perkembangannya, hanya sedikit orang-orang Tionghoa yang tinggal di sana. Di daerah Balong ini terdapat orang-orang Tionghoa Solo yang dapat dikatakan sebagai Tionghoa yang paling tua di kota ini. rata-rata penduduknya yang tinggal di sana merupakan masyarakat Tionghoa yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Oleh sebab itulah, terjalin suatu komunikasi sosial dengan masyarakat pribumi yang berlangsung sangat akrab. Di kampung ini pula yang menghasilkan banyak Tionghoa peranakan, akibat perkawinan campur antara Tionghoa dengan Jawa.

Penyebaran orang-orang Tionghoa di Solo terjadi mulai abad ke-20. Tempat strategis seperti Nonongan dan Coyudan menjadi pilihan mereka. Tahun 1960-an, para pedagang Tionghoa sudah menyebar ke lokasi strategis lain seperti jalan-jalan sekitar Pasar legi, Pasar Gedhe, dan Pasar Singosaren .

---

[5] Jumlah Orang Timur asing di wilayah Karesidenan Suarakarta pada akhir abad ke-19 berjumlah 8.403 jiwa, 56,7% berada di kota Solo. Pada tahun 1930, jumlah orang tionghoa di Karesidenan Surakarta mencapai 21.227 jiwa. Lih. Benny Juwono, 1999, *Etnis Cina di Surakarta 1890-1927 : Tinjauan Sosial-Ekonomi*, dalam lembaran Sejarah Volume. 2, No.1. Hal : 51,63, dan 69.

KERAGAMAN SUKU – ANTARA TOTOK DAN PERANAKAN

Secara fisik, orang-orang Tionghoa terlihat sama dan mudah untuk dibedakan dari etnik lain. Tetapi jika diamati lebih seksama, sesungguhnya orang-orang Tionghoa di Solo terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki banyak perbedaan.

Para imigran dari Tiongkok berasal dari bermacam-macam suku bangsa. Kedatangan mereka setelah abad ke-19 umumnya secara individual. Kelompok suku bangsa lain yang banyak datang ke Jawa adalah Hokkian, Hakka, Tio ciu, dan Kwang Fu (Cantonis) dan lain-lain. Lihat tabel 1.

Tabel 1. Suku Bangsa Tionghoa di Solo Tahun 1930

Suku Bangsa	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
Hokkian	309.253	245.728
Hakka (Khe)	124.905	75.831
Tio Ciu	63.423	24.389
Kwang Fu	97.740	38.390
Lain-lain	123.941	64.468
Jumlah	719.262	448.806

Sumber : "Volkstelling 1930 deel VII. Chineezen en ondere Vreemde osterlingen in Netherland Indie". Departement van Economische Zaken, Batavia, 1935. Hal : 88

Masyarakat Tionghoa di Solo, lebih di dominas oleh etnik Hokkian dibandingkan etnik yang lainnya, sehingga patut dikatakan bahwa suku bangsa Hokkian memiliki peran penting di dalam kegiatan sehari-hari komunitas Tionghoa yang ada di Solo. Satu hal yang dapat membedakan kesukuan mereka hanyalah dari bahasa sehari-hari yang mereka gunakan. Ada empat bahasa yang dipakai oleh masing-masing Etnik dalam masyarakat Tionghoa di Indonesia, antara lain bahasa Hokkian,

Tio ciu, Hakka dan Canton. Para imigran Tionghoa ini umumnya berasal dari propinsi Fukien bagian selatan, propinsi Swatow, dan propinsi Kuangtung (Guangdong).

Orang Hokkian dan keturunnya yang telah berasimilasi sebagai keseluruhan paling banyak ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Indonesia bagian timur dan Pantai barat Sumatera[6]. Sedangkan imigran Tionghoa yang berasal dari Etnik Tio ciu, dan Hakka, umumnya berimigrasi ke Sumatera Timur, Bangka, dan Belitung. Tenaga mereka dipahami sebagai kuli perkebunan dan pertambangan. Di wilayah solo, setidaknya terdapat empat suku bangsa Tionghoa yang menetap. Mereka adalah Etnik Hokkian, Hakka, Tio ciu, dan Kwong Fu (Cantonis). Mengenai jumlah mereka dapat dilihat dalam tabel 1.

Etnik Hokkian berasal dari propinsi Fukien bagian selatan. Daerah tersebut adalah daerah yang sangat penting dalam pertumbuhan perdagangan orang-orang Tionghoa ke seberang lautan. Mereka pada umumnya sangat menguasai sifat dagang yang dikenal begitu ulet, tahan uji dan rajin. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila sebagian besar perdagangan di Solo dipegang oleh orang-orang Hokkian. Etnik Hakka dan Kwong Fu umumnya berasal dari propinsi Kwangtung (Guangdong). Untuk Etnik Hakka menghuni wilayah Kwantung bagian selatan sedangkan Etnik Kwong Fu menghuni wilayah Kwantung bagian barat. Pusat daerah mereka terdiri dari daerah gunung-gunung kapur yang tandus dan sulit untuk pertanian. Oleh sebab itulah mereka lebih memilih untuk merantau ke daerah diseberang lautan. Selama berlangsungnya gelombang

---

[6] Puspa Vasanti, "Kebudayaan orang Tionghoa di Indonesia" dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, 1979, Jakarta : Djambatan. Hal. 346.

imigrasi dari tahun 1850-1930, orang-orang Hakka adalah yang paling miskin diantara para perantau Tionghoa. Sementara itu, etnik Tio Ciu juga banyak memasuki Indonesia. Etnik ini berasal dari pantai selatan Cina, daerah pedalam Swatow di bagian timur propinsi Kwangtung. Mereka dipakai jasanya oleh Belanda sebagai kuli tambang dan pekerja perkebunan di luar Jawa. Ini terjadi pula pada etnik Kwong Fu .

Keragaman Etnik dalam masyarakat Tionghoa di Solo disebabkan oleh masuknya orang-orang Tionghoa yang semula didaerah pertambangan dan perkebunan di luar jawa ke Batavia, Jawa Barat dan Jawa Timur. Mereka yang semula menjadi kuli beralih profesi menjadi pedagang. Hal ini mereka lakukan karena tidak memiliki biaya yang cukup untuk kembali ke daerah asal atau karena memang berkeinginan tinggal diperantauan.

Masyarakat Tionghoa di Solo terbentuk sebagai hasil dari aktivitas individu yang tidak terorganisasi dengan baik. Mereka yang berasal dari Tiongkok ataupun perantauan yang berasal dari daerah-daerah pertambangan dan perkebunan di luar Jawa seperti yang disebutkan di atas, datang secara individu dan sukarela. Keragaman ini memunculkan beberapa bahasa yang berlainan, sehingga dalam interaksi sosialnya sukar bagi mereka untuk dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Suatu tuntutan bagi para pendatang baru Tionghoa untuk lekas mengerti dan menggunakan bahasa setempat secara fasih. Dengan demikian mereka dapat melaksanakan fungsinya sebagai pedagang, mempertahankan mata pencahariannya dan memperoleh perlindungan keamanan dari masyarakat setempat demi kelangsungan hidup di tempat baru.

Semenjak kedatangan para imigran Tionghoa ini, pada akhirnya membentuk komunitas baru yang merupakan sebuah

perpaduan dua individu yang berbeda dan dua kebudayaan yang berbeda pula. Dalam dunia antropologi, disebutkan bahwa percampuran dua kebudayaan yang berbeda disebut sebagai sebuah proses Asimilasi[7]. Demikian halnya yang terjadi di Solo, dimana golongan Tionghoa yang ada merupakan sebuah bentuk masyarakat baru yang merupakan percampuran antara kebudayaan Jawa (mayoritas) dan kebudayaan Tionghoa (minoritas). Proses asimilasi ini yang membawa suatu dinamika masyarakat baru yang disebut sebagai golongan Tionghoa Peranakan. Dengan masih menganut budaya dari ayahnya (Tionghoa totok) dan juga budaya ibunya (Pribumi Jawa), meskipun mereka sudah tidak lagi memakai dialek masing-masing etnik atau dialek Tionghoa.

Dialek Tionghoa dipertahankan hanya oleh keluarga-keluarga Tionghoa totok yang menghendaki kemurnian adat dan tradisi mereka sebagai komunikasi dalam keluarga dan diantara mereka yang satu etnik. Faktor yang mendorong hilangnya bahasa asli adalah proses perkawinan dengan orang-orang setempat yang melahirkan Tionghoa Peranakan. Ditambah pula ketika golongan Peranakan mendapatkan pendidikan barat khususnya di sekolah-sekolah Belanda, yang membuat mereka cenderung memakai bahasa Belanda atau melayu untuk berkomunikasi dan mulai melupakan bahasa asli leluhur mereka[8].

---

[7] Koentjaraningrat., 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta. Hal : 255.

[8] Wawancara dengan Bp. Ir. Djoko Prananto (Khok Ping), pada tanggal 9 Februari 2008. Tionghoa Peranakan yang mendapatkan pendidikan barat atau Belanda (biasa diistilahkan sebagai Hol'land Spre'ken) cenderung tidak suka dengan

Masyarakat Tionghoa terdiri dari bermacam-macam etnik seperti dalam penjelasan diatas tetapi jika dilihat dari pembagian golongannya, di Indonesia masyarakat Tionghoa terbagi menjadi dua golongan, yaitu Tionghoa Totok dan Peranakan. Berdasarkan atas kenyataan yang ada, yang disebut sebagai Tionghoa Totok adalah pertama, seorang Tionghoa yang dilahirkan dari Ayah dan Ibu yang berasal dari daratan Tiongkok (RRT) di wilayah Indonesia (dulu hindia belanda). Kedua, seseorang yang dilahirkan di Tiongkok dari ayah dan ibu yang kemudian orang tersebut merantau hingga menetap di Indonesia. Tionghoa Totok pada umumnya masih memakai bahasa mandarin atau Kuoÿu (bahasa nasional Tiongkok) atau memakai bahasa masing-masing etnik. Mereka pada umumnya berorientasi penuh pada budaya Tiongkok dan tidak mau melebur dengan budaya setempat atau lokal. Tionghoa totok oleh kaum Tionghoa peranakan disebut sebagai singkeh (baca: Singkek) yang berarti tamu baru.

Sedangkan yang disebut sebagai Tionghoa Peranakan adalah pertama, orang Tionghoa yang lahir akibat perkawinan campur antara ayah Tionghoa dan Ibu Pribumi. Biasanya mereka akan diakui secara sah oleh ayahnya dan didaftarkan sebagai anak sah dengan diberi nama marga (She) ayah. Kedua, orang Tionghoa yang dilahirkan dari perkawinan campur antara seorang ayah Pribumi dan ibu Tionghoa. Namun karena alasan tertentu (biasanya masalah sosial dan ekonomi) diberi nama

---

kebudayaan leluhurnya termasuk pemakaian bahasa Mandarin atau Kuo-ÿu (bahasa nasional RRT) atau dialek masing-masing Etnik (bahasa Hokkian, Tio Ciu, Kwong Fu). Mereka lebih bangga jika memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar sehari-hari.

marga (She) dari keluarga Ibu dan mendapatkan pendidikan Tionghoa dari keluarga tersebut. Ketiga, seorang Tionghoa yang lahir dari hasil perkawinan antara seorang ayah peranakan dan ibu peranakan dan diberi nama Tionghoa. Orang-orang Tionghoa Totok menyebut Tionghoa peranakan dengan sebutan Babah.

Dalam kalangan Tionghoa Peranakan (Babah), terdapat dua golongan yang berbeda. Tionghoa peranakan yang berorientasi penuh ke Tiongkok (budaya Tionghoa dan Jawa) dan Tionghoa peranakan yang berorientasi ke barat (budaya belanda). Seorang Babah yang berorientasi ke Tiongkok, umumnya masih menjaga tradisi Tionghoa yang diturunkan dari garis ayah atau ibu (Tionghoa). Mereka masih memakai aturan-aturan yang sama dengan aturan yang ada pada Tionghoa Totok, namun dari segi bahasa, mereka sudah memakai bahasa setempat. Cara berpakaian Tionghoa Peranakan yang berkiblat ke Tiongkok, bagi yang laki-laki selalu memakai baju Thang-sha (baju panjang Tiongkok) dan yang perempuan memakai kebaya (seperti cara berpakaian ibunya yang pribumi). Sedangkan bagi golongan Tionghoa peranakan yang berkiblat ke barat, umumnya cara berpakaian mereka bagi yang laki-laki memakai stelan kemeja dan jas diikuti dengan yang perempuan memakai kain model rok. Orang-orang Tionghoa peranakan yang berkiblat ke Tiongkok biasa menyebut golongan Tionghoa Peranakan yang berkiblat ke barat dengan sebutan “Hol’land Spre’ken”. Orang-orang Tionghoa Peranakan yang Hol’land Spre’ken selalu mengikuti tradisi yang ada pada orang-orang Belanda (khususnya) dan barat pada umumnya. Mereka mendapatkan pendidikan model Belanda atau barat, dan meninggalkan tradisi leluhur mereka yang dianggapnya kolot atau kuno.

AGAMA DAN BUDAYA

Masyarakat Tionghoa di Solo pada abad ke-20 sudah mengalami akulturasi budaya, adat, dan agama; walaupun ada diantara mereka yang masih menjaga keyakinan pada tanah leluhur. Pada umumnya orang-orang Tionghoa yang datang dianggap sebagai pemeluk agama Buddha . Anggapan ini disebabkan bentuk-bentuk peribadatan yang mereka lakukan ada semacam kesamaan, juga karena keawaman masyarakat tentang agama dan kepercayaan yang orang Tionghoa di Solo. Secara umum, agama dan kepercayaan mereka dapat dikelompokkan dalam kategori berikut : 1) Khong Hu Cu (Confusianism), 2) Taoisme dan Buddha, 3) Kristen, 4) Katolik, 5) ajaran Tri Dharma (ajaran Buddha, Taoisme dan Khonghucu), dan 6) Islam. Tetapi sangat disayangkan, data mengenai jumlah penganut agama dan kepercayaan orang-orang Tionghoa di Solo pada masa itu tidak diperoleh, sehingga kehidupan religi mereka tak dapat digambarkan secara jelas disini.

Ketika Solo masih di bawah kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, hingga pada masa Indonesia merdeka (Ketika Solo menjadi Kotamadya), Orang-orang Tionghoa di Solo masih menganut agama Khonghucu Taoisme dan Buddha atau gabungan ketiganya yang disebut dengan Tri Dharma (Sam Kauw Hwee). Terbukti dengan adanya berbagai tempat ibadah yang diperuntukkan bagi agama Khonghucu, Taoisme dan Buddha. Di Solo terdapat tiga tempat ibadah yang terkenal bagi ketiga agama tersebut atau gabungannya (yang biasa disebut Tri Dharma), yakni Kelenteng Tien Kok Sie (1745) yang berada di Jl. Ketandan no.63, Kelenteng Poo An Kiong (1818) yang berada di Jl. Seloyudan, dan Lithang MAKIN solo yang berada di Jl. Jagalan no.15. Selain ketiga tempat ibadah tersebut, masih

terdapat tempat ibadah lain di Solo tetapi tidak begitu terkenal. Diantaranya : Kelenteng San Tek Tong (1940) yang berada di Jl. Kebalen no.11, Cetýa Kstigarbha di Jl. Hasanudin, dan Vihara Mapanbumi yang berada di Jl. Timah.

Perlu dijelaskan lebih lanjut, bahwasanya penganut agama Khonghucu di Solo selalu beribadah di Lithang MAKIN Solo, yakni tempat untuk sembahyang kepada Thian dan menghormati Nabi Khongcu. Ditempat tersebut biasanya diadakan sembahyang memperingati hari lahir dan wafatnya Nabi Khongcu[9], selain itu juga sembahyang tiap tanggal 1 dan 15 penanggalan IMLEK. Umat khonghucu juga mengadakan sembahyang untuk memperingati hari-hari raya tionghoa seperti Sincia (Xin Jia), Sembahyang Tuan Alah (tanggal 8 bulan 1 IMLEK), Tongciu dll.

Bagi umat yang beragama Buddha, atau Taoisme; biasanya selalu beribadah di Kelenteng-kelenteng yang sudah disebutkan di atas. Adapun kelenteng paling tua di Solo adalah Kelenteng Tien Kok Sie yang berada di Jl. Ketandan no.63, memiliki altar pemujaan utama kepada Dewi Kwan Im Poosat . Kebanyakan orang-orang Tionghoa di Solo selalu menyebut dirinya menganut ajaran Tri Dharma (yang mengakui ketiga orang suci : Buddha Sakyamuni, Nabi Khongcu, dan Mahadewa Taisan Laocun).

Orang-orang Tionghoa di Solo yang beragama Islam sangatlah sedikit, demikian halnya dengan yang beragama Kristen ataupun Katolik ketika abad ke-20. Masuknya Belanda

---

[9] Adapun Nabi Khongcu lahir pada tanggal 27 bulan 8 IMLEK (551 SM) dan wafat pada tanggal 18 bulan 2 IMLEK (479 SM). Lih. Xs. Tjhie Tjay Ing., 1957, *Riwayat hidup Nabi Khongcu*, Surakarta : MAKIN. Hal : 14 & 131.

ke Indonesia, yang membawa serta agama Kristen sebagai simbol utama Belanda, tidak berpengaruh terhadap komunitas Tionghoa di Solo meskipun ada orang-orang Tionghoa yang masuk ke agama Kristen[10].

Secara umum, budaya atau tradisi yang masih dilestarikan oleh orang-orang Tionghoa di Solo tak berbeda jauh dengan Tionghoa di daerah lain di Indonesia. Orang Tionghoa di Solo meskipun dia seorang Kristen, Katolik ataupun Islam, juga masih merayakan Tahun Baru Imlek (Sincia) dan Ceng beng. Meskipun tradisi lainnya seperti Tong Ciu Phia, Sembahyang Tangceh atau Ronde dan tradisi-tradisi Tionghoa lainnya , tidak dilakukan oleh orang-orang Tionghoa di Solo. Dapat dihitung jumlah orang-orang Tionghoa di Solo yang masih melestarikan budaya leluhur mereka. Umumnya, orang-orang Tionghoa di Solo lebih banyak mengikuti perayaan-perayaan yang berkaitan dengan agama yang mereka anut, seperti Katolik, Kristen, dan Islam. Perayaan tersebut (misalnya : Perayaan Natal), justru sudah melekat dalam diri mereka daripada tradisi yang sudah turun temurun diwariskan oleh leluhur mereka.

---

[10] Orang-orang Tionghoa yang beragama Kristen ini, biasanya merupakan orang-orang Tionghoa peranakan yang mendapatkan pendidikan ala Barat atau Belanda. Biasa disebut sebagai Tionghoa Babah *Hol'land Spre'ken* (lihat penjelasan pada sub bab sebelumnya). Sebagai perbandingan; bahwa maraknya mobilitas agama dari Buddha, Taoisme, dan Khonghucu ke Kristen atau Katolik baru terjadi ketika jaman orde baru yang ditandai dengan Inpres No. 14 tahun 1967.

ORGANISASI TIONGHOA DI SOLO

Orang-orang Tionghoa peranakan di Solo sudah sejak lama berasimilasi dengan masyarakat setempat. Bahkan mereka juga dekat dengan kalangan istana, baik itu dengan kasunanan Surakarta maupun dengan kadipaten Mangkunegaran. Kaum peranakan ini umumnya sudah tidak fasih berbicara dengan dengan bahasa mandarin, tetapi sudah berkomunikasi dengan memakai bahasa setempat[11].

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Tionghoa di Solo membentuk suatu wadah berupa organisasi sosial untuk memfasilitasi kaum mereka. Baik orang-orang Tionghoa Totok ataupun peranakan juga membentuk organisasi sosial yang berguna sebagai tempat mereka berkumpul. Penyebab semuanya ini selain karena mereka harus mempunyai alat pemersatu diantara orang-orang Tionghoa juga diakibatkan oleh politik kolonial Belanda[12].

Pada dekade pertama tahun 1900, tercatat hampir di seluruh kota besar di Jawa termasuk Solo, telah tumbuh organisasi-organisasi sosial-politik. Jumlah organisasi tersebut terus berkembang pada tahun-tahun berikutnya. Tetapi ditinjau dari

---

[11] Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwasanya budaya pribumi dari pihak Ibu lebih mendominasi orang-orang Tionghoa peranakan, termasuk dalam struktur bahasa mereka.

[12] Mengenai politik yang dilakukan oleh pemerintah colonial Belanda pada bab sebelumnya sudah dijelaskan. Secara garis besar diterangkan bahwa Belanda membagi masyarakat Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu : Golongan Eropa (menduduki kelas pertama), Golongan Timur asing seperti Tionghoa, India dan Arab (menduduki kelas kedua), dan Golongan Indonesia Pribumi (menduduki kelas terakhir).

segi “Ideologis”, organisasi yang ada terbelah menjadi tiga aliran yang saling bertentangan dalam memandang nasionalisme.

Aliran yang pertama adalah organisasi sosial-politik yang dipelopori oleh kelompok Sin-Po. Kelompok ini memiliki pandangan untuk tetap mempertahankan dan memelihara nasionalisme serta kebudayaan Tiongkok. Kelompok Sin-Po beranggotakan orang-orang Tionghoa Totok yang memiliki suatu pendapat bahwa mereka menganggap orang-orang Tionghoa Peranakan sudah terpengaruh budaya barat, dan lebih suka bersekolah di sekolah-sekolah Belanda yang diperuntukan khusus bagi anak-anak Tionghoa. Kelompok ini juga melontarkan kritikan bahwa melalui pendidikan barat, generasi Tionghoa menjadi lebih bersifat kapitalis dan mulai meninggalkan tradisi leluhur orang-orang Tionghoa. Mereka juga menganggap bahwa dengan adanya pengangkatan pemimpin Tionghoa (seperti Mayor, Kapitein, Leutnan dll) oleh pemerintah Belanda; hal tersebut justru akan menimbulkan suatu sikap keberpihakan terhadap pemerintah Belanda dan mementingkan diri sendiri daripada memperhatikan kelompoknya.

Aliran kedua adalah kelompok Chung Hua Hui (CHH) yang menganut “ideologi” yang berorientasi ke Hindia Belanda dan lebih bersifat kompromis terhadap penguasa kolonial Belanda. Sedangkan aliran ketiga adalah kelompok yang menghendaki adanya integrasi atau penyatuan dengan masyarakat pribumi. Mereka berpandangan bahwa mereka merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga orientasi mereka cenderung ke Indonesia dan turut memberikan kontribusi bagi perjuangan kemerdekaan.

Kelompok yang menganut aliran ini adalah Partai Tionghoa Indonesia (PTI).

Selain organisasi yang bercorak politik tersebut, terdapat banyak organisasi yang berorientasi penuh pada masalah sosial, kematian dan kemasyarakatan. Seperti perkumpulan kematian, olahraga, seni budaya, ekonomi dan perkumpulan pemuda maupun kebatinan. Mengenai banyaknya perkumpulan atau organisasi Tionghoa yang berorientasi pada berbagai bidang seperti sosial, politik, kematian dan kemasyarakatan tersebut, diberitakan dalam surat kabar Mata Hari terbitan semarang, edisi 3 mei 1936. Isi berita tersebut adalah:

"*meskipoen berlaenan kepentingan jang dikedjarnya di Indonesia ada banyak sekali perkoempoelan Tionghoa....Ada perkoempoelan kematian, sport, moeziek, ekonomis, social, dan politiek, malah perkoempoelan pemoeda tida ketinggalan maoepoen perkoempoelan kebathinan... Perkoempoelan jang terbanjak jalan perkoempoelan jang kandoeng arti pergaoelan oempamanya boeat sokong menjokong didalem oeroesan kematian, perkawinan ataoe laen-laen keperloean pergaoelan. Tegesnya jang bersifat social, jaitoe oentok perhoeboengan satoe sama laen, sehingga orang Tionghoa tida oesah merasa hidoep terpencil*."

Berdasarkan pemberitaan dari surat kabar Mata Hari tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa orang-orang Tionghoa memiliki organisasi-organisasi Tionghoa yang tidak hanya berorientasi pada masalah kematian dan sosial namun juga bidang lain seperti olahraga, ekonomi dan politik.

Adapun organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang berdiri sejak tahun 1920 di Solo antara lain : Siang Boe Tjong Hwee, Tiong Hoa Hwee Kwan (THHK), Kok Sia Hwee, Kong Tong Hoo, Poen Sing Hwee, Hua Chiao Tsing Nien Hui

(HCTNH), Hiang Gie Hwee, Giok Tjong Hwee, Tiong Lian Tjong Hwee, Sam Ban Hien, Hoo Hap, Ping Bin Hak Hauw, Hwa Kiauw Kong Hak, Tay Tong Hwee, Giok Hiong, Kioe Kok Gie Tjien Hwee, serta Kok Bin Tong. Diantara kesemua organisasi di atas, THHK dan HCTNH cenderung memiliki visi politik segaris dengan kelompok Sin Po, namun mereka masih tetap juga menggeluti bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Hubungan yang terjalin antar perkumpulan tersebut, meskipun berbeda visi misi atau ideologi sangatlah erat. Kedekatan mereka terbangun secara konstruktif, khususnya dalam hal menyikapi setiap persoalan atau ekonomi. Pada beberapa kasus, memang kadang terjadi perbedaan pandangan antar organisasi tersebut, namun relatif tidak sempat berkepanjangan sehingga tidak menimbulkan perpecahan atau konflik yang menajam diantara pengikut organisasi-organisasi itu.

Pada tahun 1920, di Solo sudah banyak berdiri organisasi-organisasi yang berpandangan politik maupun sosial kemasyarakatan, seperti pada penjelasan sebelumnya. Banyaknya organisasi Tionghoa di Solo, membuktikan adanya kemajemukan masyarakat Tionghoa yang ada. Organisasi-organisasi Tionghoa yang menjamur di Solo pada era 1920, tidak hanya sebatas pada organisasi yang berideologi politik melainkan juga yang berkaitan dengan bidang sosial. Dengan banyaknya organisasi-organisasi Tionghoa yang ada di Solo, ternyata tidak mempengaruhi tingkat kedekatan intern Tionghoa. Hubungan komunikasi antar perkumpulan tersebut terbangun secara konstruktif, meskipun mereka memiliki ideologi yang berbeda (seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya). Komunikasi yang konstruktif tersebut, dapat dicontohkan ketika terjadi permasalahan tarif listrik di Solo. Ketika itu SEM

(Solosche Electriciteit Maatschappij) suatu perusahaan listrik seperti PLN, menetapkan kenaikan harga tarif listrik serta alat-alat listrik yang dijual SEM. Masyarakat Tionghoa di Solo memprotes kenaikan tarif tersebut karena dianggap tidak sepadan dengan pelayanan SEM yang mengecewakan. Mereka kemudian mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai permasalahan listrik tersebut. Pertemuan yang difasilitasi oleh Ong Siang Tjoen (Ketua Siang Boe Tjong Hwee), diadakan di gedung THHK Poerwadiningratan yang dihadiri oleh 40 utusan dari perkumpulan seperti : Kok Sia Hwee, Kong Tong Hoo, Poen Sing Hwee, Hua Chiao Tsing Nien Hui, Hiang Gie Hwee, Giok Tjong Hwee, Tiong Lian Tjong Hwee, dan Sam Ban Hien.

Hubungan komunikasi yang sangat baik itu, menumbuhkan inisiatif penyatuan diantara mereka. Upaya penyatuan tersebut mulai dirintis pada tahun 1929, terdapat enam perkumpulan sosial kemasyarakatan yang akan bergabung menjadi satu wadah, yaitu : Kong Tong Hoo, Hiang Gie Hwee, Hap Gie Hwee, Kong Sing Hwee, Sam Ban Hien dan Tiong Hoa Poen Sing Hwee. Mereka kemudian melakukan serangkaian pertemuan untuk membicarakan rencana penyatuan organisasi yang mereka ikuti. Pada tanggal 7 Juli 1931 terbentuk panitia persiapan penggabungan keenam perkumpulan tersebut. Pembentukan panitia tersebut ternyata tidak serta merta langsung melahirkan wadah baru yang menampung keenam organisasi tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa penggabungan boleh dibilang sangat sulit, karena masing-masing perkumpulan memiliki pandangan berbeda mengenai nama organisasi dan asas yang akan digunakan. Banyaknya pertentangan dari masing-masing anggota keenam perkumpulan yang akan menggabungkan diri menjadi kendala bagi pembentukan satu wadah yang utuh.

Hampir setahun panitia bekerja keras, baru pada tanggal 1 April 1932 tercapai suatu kesepakatan untuk membentuk wadah baru, yang diberi nama Chuan Min Kung Hui (disingkat CMKH). Pada rapat panitia tersebut, selain menentukan nama organisasi gabungan, panitia juga menyepakati pengangkatan ketua bagi organisasi baru tersebut. Nama Tan Gwan Swie dipilih menjadi ketua organisasi CMKH. Kas awal organisasi didapat dari hasil iuran rapat anggota berupa uang kontan, dan perabotan senilai f.52.600.22. Sebagai pusat kegiatan dipilih gedung di Jalan Sorogenen 124 Solo yang biasa dikenal masyarakat dengan nama Gedung Gajah.

Organisasi CMKH pada awalnya memiliki peran yang penting hanya bagi masyarakat Tionghoa di Solo. Pada perkembangannya, CMKH justru tidak hanya berperan bagi orang-orang Tionghoa melainkan juga orang-orang Pribumi. Peran organisasi tersebut masih terus berlanjut sampai organisasi tersebut sudah berubah namanya menjadi PMS. Peran yang dirasakan cukup berarti bagi kalangan Pribumi dan di samping juga keterlibatan Pribumi di dalam organisasi PMS ini.

Pada awal berdirinya, organisasi ini mula-mula lebih berkonsentrasi pada masalah kematian (perkumpulan kematian-Begrafenisfund), yaitu bertujuan memberi bantuan kepada tiap-tiap anggota yang sedang mendapat musibah kematian dan memberi bantuan kepada orang-orang Tionghoa yang miskin di Solo [13]. Kegiatan tersebut ditunjang dengan adanya rumah

[13] Masalah kematian yang dimaksud disini adalah mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kematian seperti masalah krematorium jenasah, tempat persemayaman jenasah, upacara-upacara untuk kematian, dan juga merawat abu

persemayaman jenasah yang dikenal orang dengan nama "Thiong Ting". Rumah tersebut selain berfungsi sebagai tempat persemayaman jenasah juga sebagai tempat untuk memelihara abu-abu leluhur yang jenasahnya diperabukan, dan juga tempat untuk merawat jenasah-jenasah orang Tionghoa di Solo dan sekitarnya. Tetapi pada perjalanannya, organisasi ini tidak hanya mengurusi masalah kematian melainkan juga masalah sosial lain seperti bantuan-bantuan kemanusiaan bagi para korban gempa, perang atau kelaparan.

Meskipun menangani masalah kematian merupakan aktivitas yang utama, bukan berarti bahwa CMKH tidak melakukan aktivitas sosial yang lainnya. Terbukti pada Juli 1932, CMKH membentuk bagian pendidikan yang menangani masalah pendidikan dan pembentukan sekolah. Bagian pendidikan mengadakan pendidikan untuk kelas rendah (Taman Kanak-kanak), namun mulai maret 1935, bagian pendidikan menambah sekolah malam untuk memberikan pelajaran Bahasa Mandarin, Bahasa Inggris, dan Bahasa Belanda. Selain itu, bagian ini juga menyediakan sarana perpustakaan dan memberikan bantuan kepada AMS (Aglemene Middelbare School) swasta di Solo. Misi pembuatan perpustakaan kecil oleh CMKH, dimaksudkan sebagai tempat para anggota CMKH dan masyarakat umum untuk membaca buku atau surat kabar.

Kedekatan dengan pribumi terlihat dengan aktifnya para tokoh pribumi seperti: Sasrosunarto, Sudaryo Tjokrosisworo, Moelyadi Djojomartono, KRMH Wiryadiningrat, Yosodipuro, H Sutadi, Sempu Sundaru, Sastrosudiro, dan Notosuroto dalam

---

sembahyangan orang-orang yang sudah meninggal (biasanya ini diperuntukkan khusus bagi keluarga Tionghoa yang tidak mampu).

kegiatan CMKH. Kegiatan yang berkaitan dengan para tokoh pribumi ini antara lain kegiatan kesenian yang berupa: tari-tarian Jawa, Gending-gending Jawa (Klenengan), keroncong dan pertunjukan wayang. CMKH kerap mengadakan pertunjukan wayang pada acara-acara tertentu khususnya pada setiap acara Ulang Tahun CMKH. Acara klenengan dan keroncong juga kerap diadakan meskipun sifatnya bukan pada acara-acara besar, karena klenengan sangat diminati oleh orang-orang Tionghoa yang ada di Solo. Orang-orang Tionghoa yang ada dalam CMKH kebanyakan merupakan Tionghoa Peranakan, sehingga tidak asing lagi bagi mereka untuk mendengarkan lagu-lagu Jawa dan pertunjukan kesenian Jawa. Dalam hal tari-tarian, CMKH sudah aktif mengadakan kegiatan dan latihan menari, terbukti ketika acara peringatan tumbuk dalem IX (usia 9 windu/ 72 tahun) dari Pakubuwana X, CMKH ikut ambil bagian dalam acara tersebut. Oleh karena peran serta CMKH dalam acara keraton tersebut, maka pada tanggal 2 Mei 1936, ketua CMKH, The Tjhioe Tik menerima bintang penghargaan dari Pakubuwana X di Surakarta.

Kegiatan lain yang dilakukan oleh CMKH adalah peran mereka dalam dunia kesehatan. Pemberian subsidi bagi poliklinik dan Rumah Sakit Tsi Sheng Yuan agar mereka mampu memberikan pelayanan kesehatan yang maksimum bagi masyarakat umum baik itu orang Tionghoa ataupun Pribumi. CMKH juga membentuk Komite Penolong Kaum Pengangguran (KPKP); komite ini dibentuk dengan tujuan membantu memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang di PHK atau tidak memiliki pekerjaan. Para pengangguran yang ada di Solo, di kelola dan ditampung sementara oleh komite ini kemudian mereka disalurkan untuk bekerja di berbagai tempat di Solo.

Ketika terjadi Perang (Agresi Militer Belanda I dan II), CMKH berperan aktif di dalam menangani korban-korban perang. CMKH dan Organisasi Pusat Perkumpulan Tionghoa Surakarta dibantu dengan PMI cabang Solo, membentuk Panitia Penolong Bahaya Perang. Aktivitas panitia ini adalah memberikan bantuan kepada para pengungsi yang berdatangan ke kota solo dari luar kota antara lain dari Boyolali, Ampel, Salatiga, Kuwu, Purwodadi, dan lain-lain. Bantuan tersebut antara lain berupa tempat penampungan (asrama pengungsi), makanan, dan pertolongan kesehatan bagi pengungsi. Panitia ini juga bertugas membantu pemerintah dalam menangani pemindahan jenazah-jenazah korban perang sipil yang tersebar dimana-mana[14].

CMKH juga berperan aktif di dalam bidang olahraga. Penyediaan sarana-sarana olahraga seperti Meja Bilyard, Meja Ping Pong atau Tenis meja, dan permainan catur. Pada permainan catur, dibentuk Perkumpulan Catur Tionghoa Surakarta pada tanggal 28 september 1950. Ketika CMKH berubah menjadi PMS[15], kegiatan Olahraga menjadi lebih maju. Pada masa PMS, regu bola sodok PMS mendapatkan juara II

---

[14] Tanggal 26 September 1950, tidak kurang dari 250 jenazah korban perang sipil dari daerah-daerah seperti Wonogiri, Sukoharjo, Sragen dan Klaten telah dipindahkan untuk mendapatkan pemakaman yang layak. Keseluruhan korban dimakam kan di sebelah selatan Gedung Thiong Ting Jebres (Pemakaman tersebut sekarang ditempati bangunan STM Warga).

[15] Melalui rapat-rapat anggota maka diputuskan pada tanggal 1 Oktober 1959, CMKH berubah namanya menjadi PMS.

dan III dalam kejuaraan Bola Sodok se-Indonesia yang diadakan Persatuan Olahraga Bola Sodok Indonesia (POBSI). Pada masa PMS, kegiatan olahraga semakin berkembang. Dibangunnya sarana olahraga seperti lapangan bulu tangkis, lapangan sepakbola dan lapangan volley membuktikan bahwa organisasi ini semakin bertambah solid.

Keanggotaan organisasi CMKH yang semula hanya diisi oleh orang-orang Tionghoa dan kegiatannya diperuntukkan hanya untuk intern Tionghoa, semenjak PMS semakin membuka diri dengan masuknya orang-orang Pribumi sebagai anggota. Kegiatan yang dilakukan oleh PMS semakin bertambah. Seperti pada Tanggal 20 Desember 1965 dengan surat keputusan Walikota no. 137/DR/XII/65 dibentuklah LPKB (Lembaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa) dengan PMS sebagai partisipan aktif.

Kegiatan sosial yang dilakukan oleh PMS selain melanjutkan kegiatan rutin yang sudah dilakukan oleh CMKH juga mengadakan kegiatan lain. PMS menyediakan juga lokasi tanah pemakaman untuk masyarakat umum. Gedung Gajah yang diadakan juga untuk acara resepsi pernikahan, yang semula hanya dipakai untuk intern Tionghoa saja dibuka untuk umum (disewakan untuk umum). Bidang pernikahan PMS, juga membantu penyelenggaraan pernikahan bagi orang-orang pribumi dengan memberikan bantuan mengurus acara tersebut.

PMS membantu beberapa panti asuhan di seluruh Jawa Tengah dengan memberikan bantuan dana ataupun bantuan lainnya seperti pakaian layak pakai, makanan dan fasilitas lain. Pada bulan Maret 1966, PMS mengadakan bhakti sosial membantu korban banjir di Solo. Pemberian bantuan berupa uang, bahan makanan, obat-obatan, dan tenaga membantu meringankan pemerintah di dalam mengatasi bencana banjir di

Solo. Dibidang kematian, PMS juga menyediakan lokasi pemakaman yang lebih luas daripada ketika jaman CMKH. PMS menyediakan empat lokasi tanah pemakaman (Kongtee), yaitu: Kuburan Kongtee Siang Bu, yang digunakan untuk umum; Kuburan Kongtee Siang Buu, Kuburan Kongtee Hiang Gie, dan Kuburan Kongtee Kong Sing yang digunakan khusus untuk anggota PMS.

Perhatian PMS tidak hanya pada bidang Kematian, atau pun sosial. Dibidang kesenian misalnya, PMS berperan aktif di dalam melestarikan kesenian Jawa seperti wayang orang, karawitan, tari-tarian, dan gending Jawa. PMS menyediakan ruangan khusus untuk latihan Tari atau kegiatan kesenian lainnya. Keanggotaan kesenian tersebut tidak hanya pada orang-orang Tionghoa melainkan juga diisi oleh orang-orang Pribumi. Selain dengan pihak keraton, PMS juga dekat dengan pribumi. Kedekatan dengan keraton sudah dimulai ketika jaman CMKH, hal itu terlihat ketika acara lustrum pertama CMKH, pihak keraton memberikan sumbangan berupa Tari Golek Mataram yang lengkap dengan pengrawit dan swarawatinya. PMS kerap mengadakan pertunjukan wayang orang dan wayang kulit. Latihan wayang orang ternyata tidak sia-sia, pada tahun 1960, PMS berhasil menjadi juara III Tingkat Nasional dalam Festival Wayang Orang Nasional. Selain itu, pada tanggal 24 Oktober 1970, PMS juga mengadakan pementasan kesenian di Jakarta guna membantu pengumpulan dana sosial proyek kemanusiaan Irian Barat. Pada tanggal 12 Agustus 1971, Misi kesenian PMS diberangkatkan ke Singapura mewakili Indonesia di dalam pementasan kesenian tradisional Jawa di National Theatre Singapura. Adapun tokoh-tokoh kesenian yang menjadi anggota PMS dari CMKH dulu adalah: Go Tik

Swan (KRT Hardjonagoro), Tan Gwan Hien, Tan Tian Ping, Lo Tik Wan, Tan Cek Lee, dan Gan Kam.

Untuk bidang keagamaan, PMS kerap mengadakan acara sembahyangan bersama ketika penyambutan tahun baru Imlek. Kegiatan tersebut tidak hanya diikuti oleh kalangan intern pemeluk agama Khonghucu, Taoisme dan Buddha tetapi juga kalangan pemeluk agama lain. Bahkan dari orang-orang Tionghoa atau Pribumi yang memeluk agama Kristen, Katolik dan Islam pun ikut serta ambil bagian dalam perayaan tahun baru Imlek. PMS juga kerap mengadakan siraman rohani berupa ceramah-ceramah keagamaan dengan diisi oleh pemuka masing-masing agama. Kegiatan yang dilakukan setahun sekali tersebut diselenggarakan di gedung PMS bagian belakang. Masyarakat Tionghoa yang tergabung dalam PMS masih mempertahankan tradisi upacara memperingati Tahun baru Imlek. Selain tradisi tersebut, mereka juga mengadakan upacara selamatan siklus kehidupan seperti: upacara selamatan punya anak, ulangtahun dan kematian. Tradisi keagamaan ini tidak dapat berkembang dengan baik pasca tahun 1965, karena semakin bertambahnya pemeluk agama Kristen dan Katolik dari kalangan Tionghoa. Banyaknya orang-orang Tionghoa yang memeluk agama Kristen dan Katolik selain disebabkan karena kurang praktisnya upacara sembahyang yang ada dalam agama Khonghucu, Buddha atau Taoisme tetapi juga disebabkan adanya situasi politik Indonesia[16].

Pada era PMS ini, kursus pendidikan Bahasa Mandarin dan Bahasa Inggris didirikan. Selain didirikannya tempat kursus

[16] Adanya pelarangan budaya Tionghoa oleh pemerintahan Soeharto melalui Inpres no.14 / 1967, tentang Agama, Kepercayaan, dan adat istiadat Cina.

tersebut pada tahun 1959-1966, PMS juga memperbaharui sistem perpustakaan yang sudah ada untuk menunjang sarana pendidikan. Tahun 1966, sekolah-sekolah Tionghoa ditutup oleh Pemerintah. Maka dari itu organisasi PMS memberikan jalan keluar bagi para peserta sekolah Tionghoa yang kebanyakan anak-anak Tionghoa anggota PMS untuk bersekolah di sekolah-sekolah Kristen atau Katolik, sekolah Warga, sekolah Tripusaka, dan sekolah swasta lainnya yang diijinkan berdiri oleh pemerintah. Dengan adanya perubahan orientasi pendidikan tersebut, secara otomatis telah menghasilkan integrasi antara golongan Pribumi (Jawa) dengan Tionghoa. Pendidikan yang diajarkan dalam sekolah-sekolah ini, kebanyakan merupakan pelajaran umum dan tidak ada kaitan yang erat dengan budaya Tionghoa . Dalam sekolah-sekolah Tionghoa, pergaulan hanya sebatas pada sesama anak-anak Tionghoa, sedangkan di dalam sekolah swasta umum atau katolik pergaulan dengan anak-anak pribumi dapat terjalin, meskipun masih terasa diskriminasi di dalam pergaulan mereka. Perhatian PMS terhadap dunia pendidikan sangat besar, terbukti pada tahun 1973, PMS telah berinisiatif meminjamkan tanah disebelah timur dan barat Thiong Ting untuk Yayasan Pendidikan Tripusaka dengan bukti surat No. 65/PMS/73 tertanggal 4 Mei 1973, dan Yayasan Pendidikan Warga dengan surat No. 089/PMS/73. Peminjaman sebagian Tanah Thiong Ting yang luas totalnya sekitar 15.000 m2 kepada Yayasan Tripusaka dan Warga mengalami masa-masa yang sulit. Terjadi silang pendapat diantara anggota PMS dan Pengurus. Sebagian besar mendukung peminjaman tanah tersebut untuk kepentingan pendidikan, namun yang lain tidak sepakat dengan peminjaman tersebut. Tetapi akibat dari kesepakatan bersama akhirnya diputuskan boleh dipinjamkan .

Kegiatan yang berbau nasionalisme yang dilakukan oleh PMS antara lain kegiatan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, Hari Kesaktian Pancasila, dan Hari-hari Nasional lainnya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, yang diikuti tidak hanya dari golongan Tionghoa namun juga Pribumi, menambah rasa nasionalisme dalam diri orang-orang Tionghoa di Solo.

Ketika pada bulan maret 1966 terjadi banjir besar di Solo, organisasi PMS ikut aktif membantu korban banjir dengan memberikan pelayanan pengobatan, pemberian bahan makanan, uang, dan tenaga. Ketua PMS ketika periode ini yaitu AMK Wignyosaputro dipilih menjadi ketua Pelaksana Komando Bencana Alam.

PENUTUP

Dengan melihat uraian tulisan di atas, dapat diperoleh gambaran tentang kehidupan golongan Etnik Tionghoa di Solo. Dimulai dari sejarah umum Etnik Tionghoa yang ada di Indonesia, hingga sejarah Tionghoa yang ada di Solo. Tulisan ini membahas mengenai kebudayaan dari orang-orang Tionghoa, yang di dalamnya mengangkat permasalahan kehidupan berorganisasi mereka. Kedatangan orang-orang Tionghoa di Solo tidak dapat dipastikan waktu awalnya, namun dapat disebutkan bahwa keberadaan orang-orang Tionghoa di Solo, sudah ada sejak berdirinya kerajaan Mataram Islam. Meninjau dari berdirinya Klenteng Tien Kok Sie yakni tahun 1745, maka dapatlah disimpulkan bahwa orang-orang Tionghoa sudah ada di Solo kurang lebih tahun 1740.

Keberadaan Tionghoa di Solo pada waktu itu, juga masih berupa imigran kelompok. Kedatangan para imigran ini, tidak lebih karena tuntutan ekonomi di negerinya yang sulit, sehingga

mereka mencari daerah baru yang dapat dipakai untuk mencari uang. Pada awalnya, imigrasi besar-besaran terjadi akibat pengaruh Belanda yang mengangkut orang-orang Tionghoa ke Indonesia untuk dijadikan buruh dalam perkebunan-perkebunan mereka di Luar Jawa, namun setelah mengalami perkembangan jaman, maka mereka sedikit mengalami perubahan hingga menyebar ke Jawa yang dirasa mudah untuk mencari uang. Setelah begitu banyak orang-orang Tionghoa yang bermukim di Jawa khususnya di wilayah Jawa Barat, kemudian mereka menyebar hingga ke Solo. Dari mereka inilah pada awalnya yang membentuk suatu koloni Tionghoa yang menetap lama dan beranak cucu.

Keturunan Tionghoa atau yang biasa disebut Tionghoa Peranakan memiliki peranan yang sangat penting. Kehidupan berkelompok mereka, pada akhirnya menciptakan suatu kehidupan berorganisasi yang sangat solid. Pembentukan organisasi-organisasi Tionghoa tak luput dari rancangan orang-orang Tionghoa peranakan, lebih-lebih ketika mereka mendapatkan pendidikan ala Belanda. Organisasi yang semula mereka bentuk hanya berupa organisasi sederhana yang berperan aktif di dalam masalah kematian saja, lama-lama berubah menjadi suatu organisasi yang mengurusi masalah-masalah lain seperti sosial-ekonomi, politik dan budaya.

Organisasi Tionghoa yang ada di Solo pada awalnya beragam dan menitik beratkan pada masalah-masalah intern. Organisasi tersebut juga masih bercorak mengelompok, tergantung dari etnik mereka masing-masing. Sebagai contoh organisasi Hoo Hap yang diperuntukkan bagi orang-orang Hokkian. Kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berbeda dari model pemerintahan Belanda, Jepang hingga Indonesia tidak

merubah eksistensi berdirinya organisasi-organisasi Tionghoa tersebut.

Munculnya generasi Tionghoa peranakan di Solo, membentuk organisasi yang lebih besar dan tidak terbatas pada ke etnisan mereka. Pada awalnya, pembentukan organisasi yang coraknya lebih ke etnisan, bergerak mengurusi masalah intern dalam kelompok mereka. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan baik, ketika menghadapi masalah yang lebih besar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka terbentuk organisasi yang sifatnya sudah bukan intern ke etnisan. Organisasi ini bernama CMKH, yang merupakan gabungan dari bermacam-macam organisasi Tionghoa yang ada di Solo[17]. Berdirinya CMKH, ternyata membawa suatu perubahan dan membentuk karakter berorganisasi dari orang-orang Tionghoa yang ada di Solo.

Salah satu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Tionghoa Solo adalah memudahkan mereka untuk mengurus masalah sosial, budaya dan kemanusiaan seperti kematian dan kemiskinan. Memang pada awal berdirinya organisasi CMKH ini, hanya sebatas mengurusi masalah kematian, seperti pendirian rumah kematian bernama Thiong Ting yang berada di bawah pengelolaan CMKH. Dengan semakin bertambahnya usia organisasi ini, maka kinerja mereka juga semakin bertambah banyak. Bidang-bidang yang semula hanya terbatas pada masalah kematian dan kemiskinan, meluas ke bidang budaya, seni dan olahraga. Dengan kata lain, bahwa berdirinya

[17] Ada enam perkumpulan sosial kemasyarakatan yang bergabung menjadi satu wadah, yaitu : Kong Tong Hoo, Hiang Gie Hwee, Hap Gie Hwee, Kong Sing Hwee, Sam Ban Hien dan Tiong Hoa Poen Sing Hwee.

organisasi CMKH, menambah kemampuan berorganisasi dari orang-orang Tionghoa di Solo.

Ketika Bangsa ini memasuki masa pemerintahan oleh orang-orang Indonesia sendiri, maka situasi politik semakin tidak menentu. Akibat yang dihasilkan oleh situasi politik yang melanda negeri ini, maka membawa dampak yang tidak sedikit pada organisasi CMKH. Tranformasi terjadi dalam tubuh CMKH, yang juga merubah nama organisasi ini menjadi organisasi PMS (Perkumpulan Masyarakat Surakarta). Perubahan dalam AD / ART organisasi CMKH, termasuk di dalamnya terdapat orang-orang dari Etnik Jawa, membawa suatu perubahan bagi CMKH. Untuk lebih terlihat nasionalismenya, dan tidak menyinggung pihak di luar orang-orang Tionghoa, maka terjadi kesepakatan dalam rapat kepengurusan CMKH untuk merubah nama organisasi dan merubah AD / ART mereka.

Keberadaan organisasi CMKH hingga berubah menjadi PMS tidak mengurangi peran mereka di dalam masyarakat umum khususnya dalam komunitas Tionghoa di Solo. CMKH memiliki peranan yang demikian besar bagi etnik Tionghoa di Solo khususnya pada setiap permasalahan yang harus dihadapi oleh orang-orang Tionghoa yang berkaitan dengan lingkungan sekeliling dimana mereka tinggal. Organisasi ini ternyata juga menjadi harapan bagi tergalangnya sikap solidaritas antara Tionghoa dengan Pribumi, meskipun harus mengubah nama dan visi misi mereka dari CMKH menjadi PMS.

Terbentuknya PMS tak lepas dari partisipasi tokoh-tokoh masyarakat pribumi di Solo. Masuknya orang-orang Jawa ke dalam keanggotaan CMKH membuat organisasi ini harus memperlihatkan jiwa nasionalisme mereka sehingga mau tidak mau harus mengubah nama organisasi tersebut. Tetapi

perubahan itu hanya sebatas pada nama dan fungsi organisasi tersebut, sistem birokrasi kepengurusan yang ada di dalam PMS tidak mencerminkan solidaritas yang ada di dalamnya. Seharusnya sebagai suatu organisasi yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat diluar Tionghoa, PMS mampu membawa orang-orang Jawa atau Pribumi untuk duduk bersama dalam kepengurusan yang penting di PMS. Dengan duduknya orang-orang Pribumi di dalam kepengurusan inti PMS, maka cerminan rasa solidaritas akan terlihat dimata masyarakat umum baik itu dalam kota Solo maupun di luar kota Solo.

Kepustakaan

Buku/Artikel:

Carey Peter. Dr., 1985, *Orang jawa dan Masyarakat Cina (1755-1825),* Jakarta: Pustaka Azet.

Cushman, Jennifer, dan Wang Gung Wu, ed., 1991, *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara,* Jakarta: Grafiti Press.

De Graaf., H. J. dkk., 1988, *Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI – Antara Historis dan Mitos*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Fung Yu Lan., 1990, *SEJARAH RINGKAS FILSAFAT CINA : Sejak Confusius sampai Han Fei Tzu*, Judul asli : *A History Of Chinese Philosophy (1937),* diterjemahkan oleh : Drs. Soejono Soemargono, Yogyakarta : Liberty.

Hariyono. P. Drs., 1993, *KULTUR CINA DAN JAWA : Pemahaman Menuju asimilasi Kultural*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Koentjaraningrat, ed., 1979, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.

Leo Suryadinata, 1988, *The Culture Of Chinese Minority in Indonesia*, Terj. Dede Oetomo, Kebudayaan Minoritas Tionghoa Di Indonesia, Jakarta: Gramedia.

Liem Thian Joe, 2001, *Riwayat Semarang*, Jakarta: Hasta Wacana.

Moedjanto G., Drs. M.A., 2001, *INDONESIA ABAD KE-20 jilid I*, Yogyakarta: Kanisius

----------, 2003, *Suksesi dalam sejarah Jawa*, Yogyakarta: USD Press.

Mona Lohanda, 1996, *The Kapitein Cina of Batavia 1837-1942*, Jakarta: Djambatan.

Mulyana Slamet., Prof. Dr., 2005, *Runtuhnya kerajaan Hindu-Djawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara*, Yogyakarta: LkiS.

Pramudya Ananta Toer., 1960, *Hoa Kiau di Indonesia*, Jakarta: Bintang Press.

Rustopo., 2007, *Menjadi Jawa: Orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Ombak.

Setiono Benny G., 2006, *Tionghoa dalam pusaran politik*, Jakarta: ELKASA.

Suryadinata Leo., 1981, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafiti Press.

----------, 1986, *Politik Tionghoa peranakan di Jawa 1917-1942*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

----------, 1990, *Mencari Identitas Nasional*, Jakarta: LP3ES.

Tan Mely G., Dr., 1981, *Cetakan kedua, Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia – Suatu masalah pembinaan kesatuan bangsa*, Jakarta: Gramedia.

Werdoyo T., 1990, *Tan Djin Sing – dari Kapitein Cina sampai Bupati Yogyakarta*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Surat Kabar Dan Majalah:

Mata Hari, 3 Mei 1936.

Perkumpulan Masyarakat Surakarta, 2002, 70 Tahun PMS 1932-2002.

Joe Lan Nio, 1940, Riwajat 40 Taon dari TIONG HOA HWE KOAN- BATAVIA (1900-1939), Batavia: THHK.

Majelis Tinggi Agama Khonghucu (MATAKIN), Seri Genta Suci Konfusian : RIWAYAT HIDUP NABI KHONGCU, Surakarta : MATAKIN, SAK TH XVIII No. 2/3.

_____ , KITAB SU SI , Terjemahan, Surakarta : MATAKIN, 1970.

Sumber Lisan :

Haksu Tjhie Tjay Ing, 70 tahun, Surakarta.

Bunsu Adjie Candra, 49 tahun, Surakarta.

Ir. Djoko Prananto, 55 tahun, Surakarta.

Iswahyudia, 58 tahun, Surakarta.

Martono, 56 tahun, Surakarta.